

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis di Indonesia semakin berkembang yang ditandai dengan maraknya kegiatan usaha diseluruh sektor ekonomi baik formal maupun informal yang akan membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan dana atau anggaran untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini, sektor pajak masih sangat diandalkan pemerintah sebagai sumber penerimaan utama.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Pembayaran pajak merupakan pewujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Maka hal ini menjadi penting sekali bagaimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga negara yang membidangi urusan segala perpajakan yang dapat membuat kebijakan yang dapat memaksimalkan pemasukan pajak bagi negara.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak. Pada dasarnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah memberikan kebijakan terbaru dan telah melakukan perbaikan proses bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan Faktur Pajak Elektronik yang disebut dengan *e-faktur*. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) PER/16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, dan yang terakhir 1 Juli 2016..

Salah satu penerapan sistem elektronik tersebut adalah menggunakan sistem e-faktur yang diterapkan mulai tahun 2014 berdasarkan Keputusan Idirektorat Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak tentang diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang juga didukung oleh aturan sebelumnya yaitu PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau penggantian Faktur pajak, Per-17/PJ/2014 tentang Perubahan kedua atas Per-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pembritahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak Per-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah didasari oleh banyaknya penyimpangan faktur pajak yang berbentuk pajak fiktif dengan jumlah pelanggaran yang bisa dibilang cukup tinggi. Sehingga kegiatan penarikan pajak transaksi dari para pengusaha kena pajak dapat berjalan dengan maksimal dan menghindari banyak penyalahgunaan mengenai faktur pajak yang terjadi. Penerapan kebijakan pajak yang menganut *self assessment* yang tercantum di undang-undang nomor 6 tahun 1983 menyebabkan rawan kecurangan dimana para wajib pajak dapat menentukan sendiri besaran pajak yang ingin dibayarkan. Dari pajak tersebut pemerintah hanya menetapkan besaran prosentase yang harus dibayar.

E-faktur merupakan kelanjutan pembenahan administrasi PPN dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT). Latar belakang Direktorat Jendral Pajak (DJP) membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, faktur pajak ganda.

Tujuan utama diberlakukan *e-faktur* adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek sekaligus proteksi bagi

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai. E-faktur memiliki manfaat untuk memberi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena mengurangi pengeluaran yang biasa dikeluarkan seperti biaya kertas, biaya kirim, biaya cetak, tenaga kerja verifikasi, pengkodean, dan mengurangi biaya pegawai yang menangani Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif kepatuhan dari wajib pajak (WP) untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Dalam hal ini tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (WP) sangatlah berperan penting karena akan memberikan pengaruh positif dan signifikan dalam bidang perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Massa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu indikator pengukuran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari untuk mencapai sasaran tingkat kepatuhan wajib pajak (WP). Sehingga tingkat rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Massa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diketahui efektifitasnya dari perbandingan hasil prosentase yang telah dihitung pada tahun 2016 dan 2017.

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Massa pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut data Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada tahun 2017 di KPP Pratama Singosari bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebanyak 1.004 wajib pajak. Untuk jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah melakukan aktivasi Sertifikat Elektronik (*e-faktur*) sebanyak 910 wajib pajak dan untuk jumlah wajib pajak (WP) yang sudah melaporkan SPT Massa PPN sebanyak 841 wajib pajak. Hal ini merupakan hasil upaya Direktorat Jenderal Pajak dan dari pihak KPP Pratama Singosari akan tetap berusaha memaksimalkan lagi.

Untuk lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pelaporan SPT Massa PPN dan guna untuk meningkatkan prosentase tingkat kepatuhan wajib pajak, dari pihak KPP Pratama Singosari memberikan sosialisasi kepada wajib pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga PKP dapat lebih memahami kewajiban perpajakannya. Program ini telah dijalankan oleh Kanwil DJP dan KPP dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan latar belakang yang membahas tentang efektifitas prosentase kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT PPN menggunakan e-faktur system, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratam Singosari dengan judul **“Efektifitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT PPN Menggunakan E-Faktur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas perkembangan jumlah wajib pajak PKP yang sudah melaporkan SPT PPN dan pertambahan jumlah wajib pajak yang sudah melakukan aktifasi sertifikat elektronik, dilihat dari per tahun sejak diberlakukannya e-faktur?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan SPT PPN wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Singosari?
3. Apa saja kendala-kendala dalam pelaporan SPT PPN menggunakan e-faktur pada KPP Pratama Singosari ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah seringkali diberikan dalam sebuah penelitian agar penelitian lebih focus dalam memperjelas tujuan dari suatu masalah yang diteliti sehingga tidak keluar dari pokok permasalahan. Maka batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada prosentase jumlah wajib pajak terdaftar per tahun 2016 dan 2017 sebagai perbandingan dalam mengukur keefektifitasannya serta tingkat kepatuhan pelaporan SPT PPN wajib pajak PKP diukur dengan ketepatan waktu dalam melaporkan SPT PPN menggunakan e-faktur di KPP Pratama Singosari.

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah wajib pajak PKP yang sudah melaporkan dan jumlah wajib pajak PKP yang sudah melakukan aktivasi sertifikat elektronik.
2. Untuk mengetahui prosentase tingkat kepatuhan pelaporan SPT PPN menggunakan e-faktur di KPP Pratama Singosari.
3. Mendeskripsikan kendala-kendala wajib pajak PKP dalam pelaporan SPT PPN dengan menggunakan deskriptif kualitatif dalam menyusun pernyataan responden.

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk melakukan penelitian dengan topik sejenis serta sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada perkembangan pengetahuan terutama ilmu perpajakan.